

Daftar Pustaka

A. Buku

- Algra, N.E, 1983, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, Bina cipta, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arba, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bosko, Rafael Edy, 2006, *Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Cetakan ke-1, ELSAM, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesai: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*, Cetakan ke Duabelas, Djambatan, Jakarta.
- Kansil, CST, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J., 2006, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, PT. Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir , 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Murad, Rusmadi, 1991, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Alumni, Bandung.
- Mustofa, 2010, *Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT*, KaryaMedia, Yogyakarta.
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Perangin, Effendi, 1994, *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Cet. 4, Raja Grafindo Persada, Jakarta

- Rubaei, Achmad, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum*, Bayumedia Publishing, Surabaya.
- Saleh, Wantjik. 1977. *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Santoso, Urip, 2013, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana Prenadamedia, Jakarta.
- Sitorus,dkk., 2006, *Hukum agraria di Indonesia Konsep Dasar dan Implementasi*, Mitra Kebijakan Tamah Indonesia, Yogyakarta.
- Soekanto,Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soerodjo, Irawan, 2002, *Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Arkola Surabaya, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., 2007, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta.
- _____, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Gadjah Mada.

B. Jurnal/Artikel/Tesis-Disertasi

- Arifah, Triviani, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Berkaitan Dengan Tukar Menukar antara Tanah Desa Dengan Tanah Perseorangan Yang Belum Didaftar di Kabupaten Gunungkidul”, *Skripsi*, Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,2016.
- Santoso, Slamet, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Berkaitan Dengan Tukar Menukar antara Tanah Desa Dengan Tanah Perseorangan Yang Belum Didaftar di Kabupaten Gunungkidul”,*Tesis*, Program Magister

Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,
2017.

Wibowo, Sinang Budi, “Tinjauan Yuridis Sengketa Tukar-Menukar Tanah yang Dibuat Di bawah Tangan di Balecatur Kabupaten Sleman”, *Tesis*, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 164, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2034).

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3643).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3696).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Permenag/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;

Permenag/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara

Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan,

Pemberian hak meliputi Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 53);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset

Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 2).

D. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring, “tukar lalu”,

<https://www.kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 11 September 2018.

www.wonogirikab.go.id, diakses pada tanggal 10 April 2018.

www.fao.org, diakses pada tanggal 4 Juni 2018.